



Transaksi Politik dibalik Dukungan: Menguak Motif Dukungan Partai PAN Di Pildaka Kepulauan Sula Tahun 2020

Sahrul Pora¹⁾, Ridho Al-Hamdi²⁾, Al Fauzi Rahmat³⁾, Resky Sirupang Kanuna⁴⁾

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Indonesia^{1), 4)}

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Indonesia²⁾

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Kota Gödöllő, Hungaria³⁾

Corresponding Author: sahrul.pora@polikant.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas motif politik di balik dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pilkada Kepulauan Sula tahun 2020, dengan fokus pada faktor yang mempengaruhi keputusan partai dalam memberikan rekomendasi kepada Hendrata Thes-Umar Umabaihi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motif utama yang melatarbelakangi dukungan politik PAN serta melihat bagaimana dinamika internal partai dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus partai dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif insentif material, terutama dalam bentuk mahar politik, menjadi faktor dominan dalam keputusan PAN, sementara motif solidaritas dan idealisme memiliki pengaruh yang lebih kecil. Selain itu, keputusan dukungan lebih banyak ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) daripada Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sehingga aspirasi masyarakat lokal kurang diperhitungkan. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pragmatisme politik masih menjadi realitas dalam proses politik elektoral di Indonesia, di mana kepentingan strategis partai lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitas kepemimpinan calon dan aspirasi pemilih.

Kata kunci: Motif Politik, Partai PAN, Pilkada

Abstract

This research discusses the political motives behind the support of the National Mandate Party (PAN) in the 2020 Sula Islands Regional Election, focusing on the factors that influence the party's decision to recommend Hendrata Thes-Umar Umabaihi. The purpose of this research is to identify the main motives behind PAN's political support and see how the party's internal dynamics in the decision-making process. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is collected through interviews with party officials and analyzed using Nvivo 12 Plus software. The results show that material incentive motives, especially in the form of political dowry, are the dominant factor in PAN's decision, while solidarity and idealism motives have less influence. In addition, support decisions are determined more by the Central Leadership Council (DPP) than the Branch Leadership Council (DPC), so the aspirations of local communities are less taken into account. The conclusion of this study indicates that political pragmatism is still a reality in the electoral political process in Indonesia, where the strategic interests of the party are prioritized over the leadership qualities of candidates and the aspirations of voters.

Keyword: Political Motives, PAN Party, Local election

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang digunakan oleh Negara Indonesia dalam pergantian kepemimpinan politik baik di level pusat maupun daerah (Syarifudin, 2022). Terdapat 2 pendekatan dalam memahami demokrasi, yakni pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Ide dasar terkait rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemerintahan harus dijalankan langsung oleh rakyat merupakan pendekatan dari demokrasi normatif. Tetapi sesuai perkembangan jaman, penerapan kedaulatan rakyat secara keseluruhan menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Sehingga menjadi lebih konkret dengan mendelegasikan orang-orang tertentu untuk mewakili kepentingannya di dalam pemerintahan. Pendekatan empirik, di sisi lain, menekankan bahwa demokrasi dalam kehidupan politik terjadi sebagai rangkaian proses di mana rakyat memilih, dan meminta wakil mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka (Arifulloh, 2015). Dalam konteks Indonesia, untuk memenuhi standar Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang "kepala daerah dipilih secara demokratis", setiap jabatan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus melibatkan partisipasi langsung warga negara (Ulum, 2021).

Pelaksanaan pemilu di Indonesia telah melakukan pemilu berkali-kali, sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, hingga saat ini (Wardana dkk., 2024). Pada masa Orde Baru, otoriterisme lebih dominan dalam pemilihan gubernur propinsi dan bupati. Karena pola top down dan patrimonial mendominasi politik Indonesia, sehingga menjadi sangat wajar bahwa aspek penting dari reformasi adalah mengganti otoriterisme dengan sistem yang lebih demokratis (Suyatno, 2016). Saat ini, pemilihan umum sangat berbeda dengan masa orde baru. Pada masa orde baru, orang tidak dapat memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nurani mereka karena ada pengaturan yang berbeda. Namun, saat ini, orang dapat memilih pemimpin negeri mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri (Hambali, 2014).

Pemilukada adalah cara demokrasi langsung untuk memilih kepala daerah di mana rakyat diberi kebebasan yang luas untuk memilih sendiri atau memilih kepala daerah sesuai keinginan mereka sendiri (Anggoro dkk., 2020). Harapan dari proses tersebut akan melahirkan kepala daerah yang yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi (Akbar, 2017). Pilkada telah mencapai dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah untuk memilih pemimpin daerah melalui proses pemilihan yang demokratis, bebas, adil, dan tanpa kekerasan. Yang kedua adalah bahwa meskipun pilkada merupakan kelanjutan dari pemilihan sebelumnya, tetapi telah meletakkan sebuah posisi baru untuk kebiasaan pergantian kekuasaan di tingkat lokal (Chaniago, 2016). Jalannya proses pilkada tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik. Partai politik adalah salah satu institusi politik yang memberikan kewenangan secara konstitusional untuk mencalonkan kader-kader terbaik mereka.

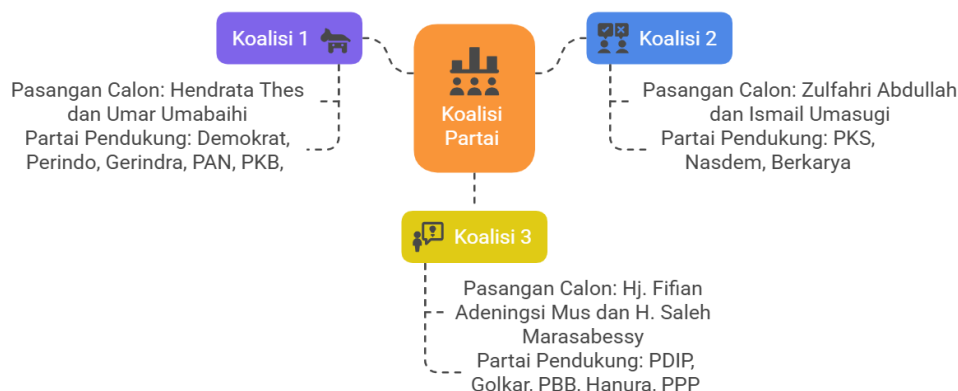
Baik undang-undang pilkada maupun undang-undang partai politik di Indonesia, partai politik sebagai lembaga utama yang memiliki otoritas untuk memilih calon kepala daerah yang akan berkontestasi di daerah tertentu. Menurut Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, warga negara Indonesia dapat di utus oleh partai politik sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Fitriyah, 2020). Sebagaimana yang jelaskan oleh Natalia, bahwa tujuan utama dibentuk partai politik memperoleh kekuasaan dan membentuk pemerintahan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif (Natalia, 2015). Untuk memperoleh kekuasaan maka partai politik diberikan kebebasan untuk melakukan rekrutmen politik terhadap kader-kader yang akan calonkan pada kontestasi pemilu.

Dalam proses rekrutmen, partai politik idealnya harus mencari orang-orang terbaik yang memiliki kemampuan dan integritas yang akan dipilih sebagai calon presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh partai politik adalah memainkan peran penting dalam memilih kader terbaiknya untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Itu tanggung jawab partai politik untuk mempekerjakan anggota terbaiknya untuk menduduki posisi pembuat kebijakan yang paling penting (Razaqtiar, 2016). Namun, partai politik tidak dapat melakukan fungsi itu dengan maksimal karena pragmatisme partai politik yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat.

Dalam beberapa kasus pilkada, pemberian dukungan atas dasar gagasan serta ide dari bakal calon juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh partai politik (Napir, 2018; Prastanya, 2017; Ropik dkk., 2018; Smith & Tsutsumi, 2016). Sedangkan di beberapa daerah pemberian dukungan didasarkan pada pertimbangan yang sangat pragmatis. Seperti yang dijelaskan oleh Ekowati, (2019) bahwa dukungan partai politik hanya mementingkan kemenangan semata yang membuat partai politik cenderung pragmatis dalam memberikan dukungan dan memutuskan partner koalisi. Demikian juga disampaikan oleh Noor, (2018) bahwa Karena pragmatisme partai politik, ideologi dan prinsip partai yang seharusnya menjadi dasar untuk mendukung dan membentuk koalisi sering diabaikan. Demikian juga dengan temuan dari Jamil dkk., (2024) yang menyimpulkan bahwa, studi ini menemukan bahwa partai politik secara internal mengalami kelemahan kelembagaan, terlihat dari ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi. Ini terjadi karena hegemoni pengurus pusat sangat kuat dalam pengambilan kebijakan, dan partai politik cenderung menjadi pragmatis dan oportunis dalam proses pengambilan keputusan karena mereka lebih cenderung mempertimbangkan keuntungan finansial daripada prinsip ideologis.

Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pilkada serentak yang melibatkan 37 Kota, 224 Kabupaten dan 9 Provinsi. Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tersebut, Kabupaten Kepulauan merupakan salah satu daerah yang turut termasuk didalamnya. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Maluku Utara. pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Sula diikuti oleh 3 bakal calon kepala daerah. Setiap partai politik turut terlibat dalam memberikan dukungan pada momentum 5 tahun tersebut.

Gambar 1.
Koalisi partai dan Pasangan Calon



Sesuai dengan gambar diatas, terdapat 3 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020. Partai PAN merupakan salah satu dari 4 partai koalisi yang turut mendukung Hendrata Thes. Dukungan yang diberikan tersebut menjadi perlu untuk dilakukan penelitian lebih jauh terkait faktor yang menyebabkan pemberian dukungan oleh Partai PAN. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui lebih jelas terkait motif sesungguhnya dari pemberian dukungan partai PAN. Penulis akan menggunakan Teori Motif Politik diantaranya motif insentif materialis, solidaritas, dan idealisme (Saputra & Al-Hamdi, 2020), untuk menganalisis kecenderungan pemberian dukungan tersebut.

METODE

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi yang menyelidiki kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan kegiatan atau situasi secara menyeluruh (Adlini dkk., 2022). Sedangkan menurut Fadli, (2021), penelitian kualitatif biasanya menggunakan pendekatan analisis induktif dan

bersifat deskriptif, membuat proses dan makna yang dihasilkan dari perspektif subyek lebih menonjol dalam penelitian kualitatif ini.

Terdapat beberapa jenis dalam penelitian kualitatif diantaranya, studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded theory dan penelitian sejarah (Syahrizal & Jailani, 2023). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis tersebut digunakan oleh penulis karena lebih bisa menjelaskan masalah penelitian yang akan penulis bahas. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik wawancara. Data-data yang dikumpulkan kemudian penulis olah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.

Nvivo merupakan sebuah perangkat lunak yang biasa digunakan dalam penelitian untuk mencari ide penelitian, menemukan literatur yang tepat, dan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian (Hafidhah & Yandari, 2021). Dalam sebuah penelitian yang menggunakan Nvivo 12, Proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu dengan mengimpor data yang wawancara, kemudian melakukan pengkodean data; setelah data dikodekan, data ditampilkan dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap partai politik di Indonesia dalam memberikan dukungan politik kepada bakal calon kepala daerah tentu punya parameternya tersendiri. Parameter tersebut biasanya sudah diatur dalam aturan main partai politik. Namun dalam banyak kasus, meskipun ada kriteria-kriteria yang umum seperti elektabilitas, Integritas, pengalaman politik, yang selalu menjadi acuan, terdapat motif-motif lain yang ikut diselipkan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tiga motif partai politik (Matrealis, Solidaritas Idealisme) dalam memberikan dukungan, selanjutnya akan dijelaskan kecenderungannya yang lebih dominan dari tiga motif tersebut.

Motif Insentif Material Partai PAN

Motif insentif material dipahami sebagai pemberian imbalan atas apa yang telah dilakukan baik oleh organisasi maupun individu terhadap orang lain. Imbalan ini berfungsi untuk meningkatkan semangat kerja individu maupun kelompok. Dengan demikian, imbalan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada individu, namun juga terhadap organisasi (Saputra & Al-Hamdi, 2020). Dukungan politik PAN kepada Hendrata Thes tentunya dilatar belakangi oleh faktor material di dalamnya. Sesuai dengan definisi dari motif insentif material, bahwa dukungan politik didasarkan pada imbalan-imbalan tertentu yang dapat menguntungkan individu, kelompok maupun organisasi. Untuk itu partai PAN sendiri pasti mempunyai dasar pertimbangan dengan melihat posisi partai serta timbal balik apa saja yang bisa didapatkan oleh partai PAN sehingga memberikan dukungan politik. Untuk lebih jelasnya berikut wawancara penulis dengan ketua DPC PAN kabupaten Kepulauan Sula:

“PAN dalam memberikan rekomendasi ke calon kepala daerah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, ya kandidat yang diusung harus bisa menang, dan yang kedua harus membantu untuk membesarkan partai PAN kedepannya, kemudian hasil survey dan yang lainnya. Kalau soal bayar membayar partai saya kurang tau jelas karena itu diatur lewat DPP, tapi sangat tidak mungkin kalau tidak ada. Ya walaupun sedikit-pasti ada saja, tapi nominalnya berapa saya kurang tau”.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Kadir Sapsuha selaku sekretaris PAN Kepulauan Sula, mengatakan bahwa:

“Kalau kita lihat dari tahapan politik di negeri ini yang dimekarkan dari tahun 2003 sampai hari ini, orang yang seharusnya kita pandang sebenarnya untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa menjadi calon kepala daerah ternyata tidak mendapatkan rekomendasi, sedangkan yang tidak layak untuk mendapatkan rekomendasi justru dia yang dapat, ya semua itu kan pasti karena Uang. Jadi yang berkaitan dengan mahar politik itu pasti ada. Apalagi untuk mengikuti pilkada di Indonesia ini kan butuh biaya yang besar, jadi ya pasti ada”.

Dalam wawancara yang lain bersama Halik Teapon yang merupakan seorang anggota DPRD aktif dikeulauan sula, meskipun tidak secara langsung mengakui bahwa mahar politik itu ada namun tidak juga membantah. Berikut hasil wawancara:

“Soal itu kami tidak tahu di DPC. Berapa banyakpun maharnya kami tidak tahu. Tapi bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa dalam pelaksanaan pilkada inikan butuh ongkos politik yang besar. Jadi mungkin mahar itu ada tapi kami di DPC tidak tau. Kalau tentang deal politik dimana kepentingan partai harus dilihat pasti ada juga”.

Sebagaimana hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya persoalan mahar politik menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal tersebut didasari juga oleh ketatnya kontestasi dalam merebutkan rekomendasi partai dari setiap bakal calon kepala daerah, sehingga setiap partai politik pasti memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat mengeluarkan rekomendasi. PAN sebagai salah satu partai yang ikut memberikan dukungan kepada Hendrata Thes-Umar Umabaihi pada pilkada Kepulauan Sula tidak luput dari persoalan mahar politik. Meskipun keterangan dari pengurus partai PAN yang tidak terlalu mengetahui lebih jauh terkait dengan syarat mahar politik yang sudah diberikan oleh Hendrata Thes kepada partai PAN dipilkada Kepulauan Sula, namun tidak juga membantah bahwa hal tersebut benar adanya.

Faktor yang menyebabkan DPC PAN tidak secara langsung mengetahui berapa nominal yang harus dikeluarkan oleh Hendrata Thes kepada partai PAN, karena hal tersebut terjadi antara DPP dan calon kepala daerah. Bukan hanya soal mahar politik, prasarat untuk dapat berkontribusi dalam membesarkan partai PAN di kabupaten Kepulauan Sula turut masuk sebagai suatu kesepakatan politik antara partai dan kandidat yang akan diusung. Sedangkan menurut ketua tim pemenang HT-Umar ketika diwawancarai mengatakan bahwa:

“Soal kesepakatan politik yang lain antara partai dan Pak Hendrata itu saya tidak tau ya, tapi kalau soal mahar politik ya menurut saya pasti ada. Kan agar partai bisa bekerja dalam mendukung kandidat, secara otomatis mereka butuh anggaran. Jadi mahar itu berfungsi untuk mengerjakan mesin partai. Bisa untuk akomodasi partai, bisa juga untuk membayar saksi”.

Keterangan dari ketua tim pemenang HT-Umar tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mahar politik antara Hendrata Thes dengan partai PAN benar adanya. Keterangan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran karena sebelumnya beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sehingga pasti sudah pernah mengetahui tentang syarat-syarat yang biasanya harus diberikan calon kepala daerah kepada partai politik agar bisa didukung.

Motif Insentif Solidaritas Partai PAN

Motif ini memiliki kepentingan untuk mendapatkan jaringan baru dalam kehidupan sosial. Menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dengan memunculkan rasa simpati, perasaan emosional serta moral yang dibentuk dari hubungan antara individu dan kelompok. Dalam konteks dukungan politik partai terhadap calon kepala daerah, motif ini berfungsi untuk memperkuat hubungan antara partai dan calon kepala daerah yang diusung (Saputra & Al-Hamdi, 2020). Dalam konteks pemilihan umum, koalisi antara partai politik terjadi karena terkadang tidak terdapat satupun partai yang mampu meraih jumlah kursi diparlemen sebagai prasarat dukungan politik dalam pilkada. Disisi lain sisi setiap kandidat ingin mendapatkan dukungan yang banyak dari partai politik agar bisa keluar sebagai pemenang. Semakin banyak dukungan yang didapatkan oleh calon kepala daerah, semakin besar pula peluang untuk bisa menjadi pemenang.

Komitmen politik yang terbangun oleh partai politik dan calon kepala daerah bisa menjadi kekuatan untuk sama-sama berjuang dalam meraih kemenangan. Partai PAN dalam pemilihan

bupati Kepulauan Sula tahun 2020 memberikan dukungan kepada Hendrata Thes. Dengan demikian, partai PAN merasa perlu untuk membentuk kekuatan bersama Hendrata Thes. Solidaritas tersebut yang kemudian menjadi kekuatan untuk memenangkan kontestasi pilkada di Kepulauan Sula. Untuk lebih jelasnya berikut wawancara penulis bersama ketua DPC PAN kepulauan Sula:

“Intinya Yang menjadi alasan utama kami mendukung karena itu perintah partai dalam hal ini DPP. Kemudian ada komitmen politik juga antara kami DPC PAN dengan pak Hendrata dan saya sendiri kemarin menjadi juru kampanye dari partai PAN. Bagi saya antara partai PAN dan Hendrata punya keinginan yang sama yaitu memajukan Kepulauan Sula. Itu yang menjadi dasar kekuatan kami untuk sama-sama berjuang di pilkada kemarin”.

Keterangan dari ketua DPC partai PAN Kepulauan Sula diatas memperlihatkan bahwa, dukungan yang diberikan oleh partai PAN kepada hendrata Thes karena ada kesamaan visi yaitu untuk memajukan kepulauan Sula. Faktor tersebut yang kemudian menjadi kekuatan untuk sama-sama berjuang agar bisa memenangkan kontestasi pilkada Kepulauan Sula. Walaupun demikian, tetap saja faktor arahan dari DPP untuk mendukung Hendrata Thes memberikan pengaruh atas sikap politik tersebut. Pendapat yang lain disampaikan oleh sekretaris DPC PAN Kepulauan Sula sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“PAN mendukung Hendrata karena di periode sebelumnya PAN mendukung kandidat lain tapi kemudian kalah. Jadi untuk apa kita berikan kepada yang lain lagi jika kalah lagi. PAN ini memiliki garis lurus, dimana meskipun kita di cabang mempunyai pandangan politik tersendiri, tapi kalau itu arahan dari DPP ya berarti kita harus laksanakan”.

Demikian halnya dengan pendapat dari Halik Teapon selaku anggota DPRD fraksi PAN Kepulauan Sula ketika diwawancarai menyatakan bahwa:

“Jadi komitmen yang dibangun ya awalnya terjadi antara pak Hendrata dan DPP bukan DPC. Dari situ kami diperintahkan oleh DPP untuk mendukung beliau melalui surat rekomendasi. Dari situlah kami dari ranting sampai cabang ikut berkomitmen dengan pak hendrata untuk sama-sama memenangkan beliau”.

Dukungan politik yang terjadi antara DPC partai PAN dengan Hendrata Thes bukan terjadi karena terdapat kesamaan visi ataupun melibatkan faktor moral yang terbangun antara DPC PAN dan Hendrata Thes. Meskipun terdapat keinginan untuk membentuk kekuatan baru agar bisa menang di pilkada Kepulauan Sula, namun itu karena ada perintah langsung dari DPP. Melalui instruksi langsung dari DPP itulah ada komitmen politik yang terbangun di DPC PAN untuk memenangkan Hendrata Thes. Kuasa DPP yang terlalu berlebihan membuat kader di tingkat cabang tak dapat berbuat banyak sebagaimana yang mereka inginkan.

Sebelumnya DPC PAN sudah mempunyai kajian tersendiri tentang kelayakan bakal calon yang harus didukung pada pilkada Kepulauan Sula. Dalam kajian tersebut, DPC PAN mempunyai kandidat lain yang ingin diusung dan bukan Hendrata Thes. Padahal seharusnya pengurus ditingkat DPC bisa diberi porsi lebih soal penentuan bakal calon kepala daerah sebab merekalah yang paling tahu tentang kelayakan bakal calon kepala daerah.

Motif Insentif Idealisme Partai PAN

Motif insentif idealisme berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang ideal. Mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi merupakan sesuatu hal yang harus diperjuangkan (Saputra & Al-Hamdi, 2020). Kelayakan bakal calon kepala daerah dari berbagai aspek tentunya menjadi prasarat yang harus terpenuhi. Hal tersebut karena setiap partai pasti menginginkan agar memiliki kandidat calon kepala daerah yang bisa keluar sebagai

pemenang. Kemenangan calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik tergantung kepada pilihan politik masyarakat, sehingga kelayakan tersebut harus terhubung juga dengan keinginan dari masyarakat. Apalagi Hendrata Thes adalah seorang petahana sehingga masyarakat sudah pasti mempunyai pengetahuan tentang kepemimpinannya di periode sebelumnya.

Faktor agama dan etnis minoritas yang menjadi kendala dalam diri seorang Hendrata Thes, tentu harus mampu dirasionalkan oleh partai PAN kepada publik. Meskipun di era ini setiap partai dituntut untuk terbuka kepada semua kalangan agar partai dapat bertahan dalam kehidupan politik elektoral, namun partai tidak bisa menghiraukan suara-suara dari bawah khususnya pemilih partai PAN itu sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara penulis dengan ketua DPC PAN Kepulauan Sula:

“Parameter yang digunakan untuk mendukung kandidat dari PAN inikan bisa banyak, bisa saja memang dukungan PAN melalui DPP ini karena memang beliau punya kesuksesan dalam membangun selama 5 tahun kemarin, kemudian hasil survey, sehingga layak untuk di dukung kembali. Pokonya dasar yang paling utama itu, partai PAN membuka diri untuk siapapun tanpa memandang agamanya. Tetapi kemarin memang ada beberapa kandidat yang mendaftar ke PAN namun karena Hendrata lebih intens berkomunikasi dengan DPP jadi dia yang dapat”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebelumnya ada beberapa kandidat masuk dalam daftar partai PAN untuk didukung. Namun karena komunikasi politik yang terus menerus dilakukan oleh Hendrata Thes dengan DPP PAN menyebabkan rekomendasi dukungan partai PAN bisa dia dapatkan. Faktor lain yang turut menyebabkan dukungan partai PAN bisa jatuh kepada Hendrata Thes Karena beliau merupakan seorang petahana yang sudah memiliki pengalaman mengurus daerah selama 5 tahun belakangan. Pengalaman dalam mengurus daerah selama 5 tahun yang lalu tersebut turut menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga rekomendasi bisa keluar. Demikian juga dengan hasil survey, PAN menggunakan hasil survey sebagai strategi untuk melihat kecenderungan mayoritas masyarakat dalam menginginkan calon kepala daerah mana yang memang layak untuk didukung kembali.

Kelayakan dari bakal calon kepala daerah tersebut sudah pasti berhubungan langsung dengan keinginan rakyat jika parameter yang digunakan adalah hasil survey. Fungsi partai politik yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak seharusnya mengabaikan apa yang menjadi tuntutan rakyat apalagi soal calon kepala daerah. Namun terdapat pendapat yang sedikit berbeda dengan ketua DPC PAN yang disampaikan oleh Halik teapon selaku anggota DPRD Kepulauan Sula, menyatakan bahwa:

“Kan tujuan kita bernegara ini ujungnya bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Jadi dukungan dari PAN ini belum tentu karena mempertimbangkan kepentingan umum (rakyat). Apalagi di internal DPC sula kemarin kan sebenarnya bukan mendukung Hendrata. Kita DPC PAN juga mengetahui pesris kondisi masyarakat dibawah khususnya pemilih PAN, yaitu mereka ingin pemimpin yang seaqidah cuman karena soal rekomendasi itu murni hak dari DPP jadi kita ya harus menjalankan. Soal agama tidak menjadi masalah karena kita kan negara demokrasi jadi tidak boleh menutup diri untuk kandidat dari agama lain”.

Pendapat yang senada disampaikan oleh Kadir Sapsuha selaku sekretaris DPC PAN Kepulauan Sula, menyatakan bahwa:

“Saya kalau kemarin yang menjadi DPP, maka saya tidak akan memberikan rekomendasi kepada Pak Hendrata Thes. Karena beliau ini hari ini bicara lain, besoknya bicara lain. Banyak janji yang kemudian beliau sering ingkari. Tapi karena beliau bicara manis di DPP sehingga rekomendasi PAN keluar untuk beliau. Jadi kami di cabang melihatnya beliau

sebenarnya tidak layak di dukung kembali di periode ini, tapi karena itu perintah DPP jadi mau tak mau kita harus jalankan”.

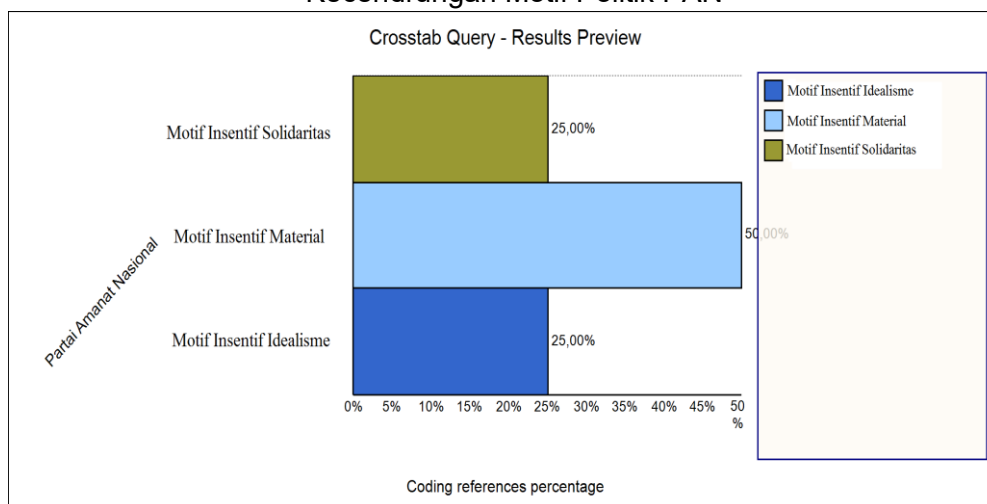
Keterangan dari pengurus yang lain sebagaimana hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam beberapa hal tentang faktor yang menyebabkan rekomendasi PAN bisa jatuh kepada Hendrata Thes. PAN dianggap seharusnya tidak memberikan rekomendasi kepada Hendrata Thes. Mengapa demikian, selama memimpin 5 tahun yang lalu Hendrata dianggap tidak berhasil dalam memajukan kabupaten Kepulauan Sula. Banyak janji-janji politik sewaktu pencalonan di periode pertama yang tidak mampu diwujudkan oleh Hendrata Thes. Disisi yang lain, para pemilih PAN lebih menginginkan untuk rekomendasi PAN diberikan kepada kandidat lain. Namun karena kuasa untuk mengeluarkan rekomendasi dukungan politik dalam pilkada merupakan wewenang penuh dari DPP, sehingga rekomendasi tersebut bisa didapatkan oleh Hendrata Tes. Karena itu telah menjadi perintah DPP, DPC PAN Kepulauan Sula dituntut untuk harus menjalankannya.

Secara idealnya, partai harus memberikan dukungan kepada kandidat yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, namun hal tersebut belum tentu menjadi ukuran partai politik dalam memberikan rekomendasi sebagaimana keterangan dari beberapa pengurus. Hal tersebut tentu akan memberikan citra buruk bagi partai politik karena mengabaikan aspirasi dari para pemilih yang konsisten memilih mereka. Partai seharusnya menjadikan aspirasi masyarakat tentang kelayakan bakal calon sebagai patokan untuk memberikan dukungan politik kepada calon kepala daerah.

Kecendrungan Motif Dukungan

Setiap partai politik di Indonesia mempunyai aturan main tersendiri mengenai dengan syarat pemberian dukungan politik kepada setiap calon kepala daerah. Faktor elektabilitas, pengalaman politik, kesamaan visi bukanlah standar utama yang dijadikan sebagai indikator dalam memberikan dukungan politik kepada Hendrata Thes. Terdapat mahar politik, deal-deal politik lain yang menjadi kepentingan partai politik juga dimasukkan sebagai sarat dukungan kepada Hendrata Thes.

Gambar 2
Kecendrungan Motif Politik PAN



Dari hasil koding N-Vivo 12 diatas terlihat bahwa, kecendrungan partai PAN dalam memberikan dukungan kepada Hendrata Thes pada pilkada Kepulauan sula tahun 2020 adalah karena adanya mahar politik sebagaimana keterangan dari para pengurus partai dan ketua tim

pemenang. Meskipun menyebutkan terdapat mahar politik antara calon kepala daerah dengan partai, namun hal tersebut terjadi di tingkat DPP. Demikian dengan nominal mahar yang sudah diberikan oleh Hendrata Thes kepada partai PAN tidak ketahui juga oleh DPC Kepulauan Sula. Pengurus di tingkat DPC hanya diperintahkan untuk menjalankan rekomendasi dukungan kepada Hendrata Thes yang sudah diberikan oleh DPP. Motif Solidaritas yang seharusnya rujukan partai PAN dalam memberikan dukungan kepada Hendrata Thes ternyata memiliki presentasi yang rendah. Sebagian pengurus partai PAN justru menginginkan agar rekomendasi tidak di berikan kepada Hendrata Thes. Hal tersebut dipengaruhi oleh rekam jejak Hendrata Thes selama 5 tahun yang dianggap banyak melanggar janjinya. Disisi yan lain banyak simpatisan partai PAN yang turut menginginkan agar rekomendasi diberikan kepada kandidat yang lain.

Sama halnya dengan motif solidaritas, motif insentif idealisme juga memiliki kecendrungan yang sangat kecil. Motif tersebut tidak banyak memiliki pengarus atas dukungan PAN terhadap Hendrata Thes sebagaimana keterangan dari para informan. Partai PAN justru seharusnya tak lagi memberikan dukungan kepada Hendrata Thes karena dianggap sudah tidak layak memimpin kabupaten Kepulauan Sula. Dalam kontek kemajuan daerah, motif ini seharusnya menjadi dasar untuk setiap partai dalam memberikan rekomendasi. Hal tersebut karena motif insentif idealisme merupakan salah satu motif politik yang lebih mementingkan kepentingan umum ketimbang individu maupun kelompok. Tujuan utama dari pilkada yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru akan tersandra oleh pragmatisme partai yang hanya memikirkan materi dan kemenangan semata.

Gambar 3
Word Frequency



Hasil coding Nvivo diatas merupakan kata-kata yang banyak disampaikan oleh seluruh informan. Kumpulan kata-kata diatas memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini. Untuk kata-kata yang memiliki keterkaitan langsung dengan temuan penelitian, kata DPP memiliki intensitas yang banyak diucapkan oleh seluruh informan. Hal itu karena sesuaialam konteks pemberian dukungan partai PAN, pengaruh DPP sangat dominan. Selanjutnya adalah kata “mahar” yang juga banyak diucapkan. Hal tersebut cukup beralasan, kecendrungan partai PAN dalam memberikan dukungan kepada Hendrata Thes yang didominasi oleh motif insentif material, sehingga kata “mahar” memiliki presentasi yang juga tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mahar politik yang diberikan oleh bakal calon kepada partai PAN terjadi di tingkat DPP. Itulah yang membuat calon kepala daerah yang sebelumnya juga mendaftar ke DPC PAN Kepulauan Sula tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat.

Pengaruh mahar politik dalam pemberian rekomendasi dukungan partai PAN kepada Hendrata Thes dipilkada Kepulauan Sula terjadi ditingkat DPP, sehingga tidak banyak diketahui nominalnya oleh DPC. Ini karena setiap bakal calon bisa membangun komunikasi politik kepada DPP agar dapat diberikan rekomendasi dukungan tanpa harus melalui DPC. Dari sini dapat dikatakan bahwa, komunikasi politik yang terbangun langsung antara DPP dan kandidat tanpa

harus melalui DPC bisa menjadi penyebab besarnya pengaruh mahar politik. Disisi yang lain, pelaksanaan pilkada yang membutuhkan anggaran dengan jumlah yang besar sehingga partai politik menginginkan agar syarat mahar politik harus mampu diwujudkan jika ingin mendapatkan dukungan. Mahar politik kemudian bisa difungsikan juga oleh setiap partai politik untuk menggerakkan mesin partai agar bisa memenangkan kandidat yang mereka usung. Demikian halnya karena orientasi partai politik yang hanya menginginkan kemenangan ketimbang kepedulian terhadap keinginan rakyat, sehingga mahar politik memiliki pengaruh yang lebih kuat ketimbang motif lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pilkada Kepulauan Sula 2020 lebih didominasi oleh motif insentif material. Mahar politik menjadi faktor utama dalam keputusan PAN memberikan rekomendasi kepada Hendrata Thes, meskipun faktor solidaritas politik dan idealisme juga turut berperan dalam skala yang lebih kecil. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan di tubuh PAN lebih dipengaruhi oleh DPP dibandingkan DPC, sehingga kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal cenderung terabaikan.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pragmatisme politik masih menjadi fenomena yang dominan dalam proses dukungan partai politik terhadap kandidat kepala daerah. Partai cenderung lebih mempertimbangkan aspek keuntungan elektoral dan finansial daripada kesesuaian kandidat dengan visi partai maupun kebutuhan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai institusi demokrasi yang idealnya berperan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Saran penulis agar peningkatan kualitas demokrasi dalam Pilkada bisa lebih baik, partai politik seharusnya lebih mengedepankan aspek integritas dan kapabilitas calon kepala daerah dalam memberikan dukungan, bukan sekadar kepentingan pragmatis. Penguatan sistem seleksi internal di tingkat DPC perlu dilakukan agar suara masyarakat di daerah dapat lebih diperhatikan dalam proses pencalonan. Selain itu, regulasi terkait transparansi pendanaan partai dan pencegahan mahar politik perlu ditegakkan lebih ketat guna menciptakan kontestasi politik yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi pada saat diwawancarai. Informan tersebut diantaranya, 1). Ketua DPC PAN Kepulauan Sula, Sekretaris DPC PAN, Anggota DPRD Fraksi PAN dan Ketua tim pemenang HT-UMAR serta pihak lain yang turut membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Akbar, I. (2017). PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA. *CosmoGov*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Anggoro, T., Yani, Y. M., Setiabudi, W., & Muradi, M. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 95–106. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6125>
- Arifulloh, A. (2015). PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK YANG DEMOKRATIS, DAMAI DAN BERMARTABAT. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 02(2).
- Chaniago, P. S. (2016). MEMPERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG. *JURNAL POLINTER* :



KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2(1), 33–45.
<https://doi.org/10.52447/polinter.v2i1.501>

Ekowati, E. Y. (2019). *Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada*. 5.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1).

Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

Hafidhah, H., & Yandari, A. D. (2021). Training Penulisan Systematic Literature Review dengan Nvivo 12 Plus. *Madaniya*, 2(1), 60–69. <https://doi.org/10.53696/27214834.39>

Hambali, M. A. (2014). *PEMILUKADA PASCA REFORMASI DI INDONESIA*. 8(1).

Jamil, D., Maksum, A., Sopyan, A. R., & Huda, A. (2024). Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada. *Jurnal Dinamika*, 5(1), 45–62.
<https://doi.org/10.18326/dinamika.v5i1.45-62>

Napir, S. (2018). Rekrutmen Politik Dalam Pilkada di Kabupaten Takalar. *Jurnal Transformative*, 4(2), 34–44. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2018.004.02.3>

Natalia, A. (2015). *PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015*.

Noor, F. (2018). Pilkada, Peran Partai Politik, Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, Dki Jakarta, Jateng Dan Jatim (2017-2018). *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2).

Prastanya, C. (2017). REKRUTMEN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOALISI PARTAI DEMOKRAT, GERINDRA, DAN PKS PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017. *JOM FISIP*, 4(2).

Razaqtiar, A. Z. (2016). *Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono—Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*. 5(3).

Ropik, A., Beriansyah, A., & Wijaya, W. (2018). Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin. *Intizar*, 24(2), 71–80.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2693>

Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R. (2020). Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 163–182.
<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.163-182>

Smith, D. M., & Tsutsumi, H. (2016). Candidate selection methods and policy cohesion in parties: The impact of open recruitment in Japan. *Party Politics*, 22(3), 339–353.
<https://doi.org/10.1177/1354068814549347>

Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Syarifudin, A. (2022). PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>

Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309–343. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>

Wardana, M. D. J., Nazwa Febri Herviana, Maria Benedicta Azalia Putri, Felixs Ade Santoso, Rakha Salman Sanusi Putra, Tania Febrianti, & Kuswan Hadji. (2024). Pengaruh Sejarah Pemilihan Umum Terhadap Sistem Ketatanegaraan Dan Hubungannya Dengan Demokrasi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 84–93.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1168>